

Pengaruh Globalisasi Terhadap Peningkatan Interdependensi Negara Berkembang Di Asia Tenggara Pada Negara Tiongkok

Hardi Alunaza, Suci Cantika, Annisa Umniyah

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Received: 28 Mei 2024

Revised: 20 May 2025

Published: 31 May 2025

Abstrak:

This paper discusses the influence of globalization on the increasing economic interdependence of developing countries in the Southeast Asian region on China. In this discussion, the concept of regionalism is used as a form of integration of developing countries in the Southeast Asian region, and the Concept of Interdependence to explain the economic dependence of developing countries in Southeast Asia on China and vice versa. The results found that cooperation carried out by developing countries in Southeast Asia with China creates an attitude of interdependence. China with a strong economy is able to provide a number of investments, foreign debt, and assistance to developing countries in Southeast Asia such as Cambodia, Laos, Malaysia, Indonesia, Vietnam, and Thailand. Meanwhile, for China, Southeast Asia is a strategic cross-route for economic interests and international trade where 90% of China's oil supply passes through Southeast Asian waters.

Kata kunci:

Interdependensi; Regionalisme; Negara Berkembang; Kepentingan Ekonomi

Pendahuluan

Interaksi yang terjalin antar negara saat ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Kemunculan globalisasi telah menghadirkan dua respons yang berbeda dalam dunia internasional yaitu menjadi kesempatan untuk melakukan kerja sama global dan terdapat pula pertimbangan kritis dari fenomena globalisasi. Globalisasi sebagai pendorong terjadinya kerja sama internasional dapat mengarah pada keamanan dan kemakmuran global. Namun, globalisasi juga dianggap dapat merusak nilai dan budaya lokal yang ada. Pada dasarnya globalisasi dapat dipahami sebagai hubungan sosial global atau interaksi global (Wattimena, 2018). Hal ini mungkin terjadi karena adanya perkembangan pesat di berbagai sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Globalisasi

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Jln Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak.
Email: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

menjadikan negara-negara sadar bahwa penting untuk melakukan kerja sama dengan negara lain yang memiliki latar belakang nilai dan culture yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari globalisasi dan mengatasi tantangan yang ada. Dalam konteks negara, globalisasi dianggap sebagai instrumen bagi negara-negara maju untuk mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga, menciptakan sistem yang menguntungkan bagi mereka, dan berupaya mempertahankan eksistensi sistem semacam ini (Maharani & Rijal, 2022).

Regionalisasi yang terbentuk akibat dari adanya globalisasi tidak terlepas dari kepentingan dari masing-masing negara yang tergabung di dalamnya. Setiap penetapan regional merupakan perwakilan dari usaha-usaha negara bangsa dalam upayanya untuk memperjuangkan tujuan ekonomi politik mereka, baik yang bersifat nasional maupun kolektif (Yuniarto, 2015). Terjadinya integrasi ekonomi global telah berhasil meningkatkan kerja sama negara bangsa dalam rangka memperkuat otonomi, memperbaiki posisi tawar menawar, dan mencapai tujuan politik dan ekonomi negaranya.

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu contoh dari terbentuknya regionalisme akibat globalisasi. Perkembangan dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tidak dapat dilepaskan dari kemampuan organisasi regional tersebut dalam menyikapi arus globalisasi. Berdasarkan data dari Indeks Globalisasi KOF (Konjungtur Forschungs Stelle) tren tingkatan globalisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2001-2015. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang signifikan pada bidang ekonomi, sosial dan politik negara kawasan Asia Tenggara. Globalisasi dalam bidang ekonomi memunculkan saling ketergantungan antar negara. Terdapat beberapa hal yang mendorong interdependensi antar negara dalam bidang ekonomi, yaitu produk yang dihasilkan oleh setiap negara berbeda sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Adanya perbedaan tersebut akan mendorong negara-negara untuk memperluas pasar bagi produk-produk dalam negerinya dan tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Semakin terbukanya kegiatan ekonomi suatu negara juga akan menjadikan pembangunan keuangan dalam negeri bertambah akibat dari meningkatnya penanaman modal asing.

Sebagai kawasan yang sangat strategis di benua Asia, mengakibatkan dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari campur tangan negara-negara super power salah satunya adalah Tiongkok. Sejak tahun 2010 negara-negara di Asia tenggara harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara anggotanya. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan Tiongkok. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara, tentunya memerlukan modal dan teknologi untuk mengolahnya. Untuk dapat membiayai kegiatan ekonomi tersebut maka pemerintah memaksimalkan alternatif lain melalui investasi asing salah satunya adalah Tiongkok. Bagi Tiongkok sendiri adanya kerja sama dengan negara-negara Asia tenggara akan meningkatkan produktivitasnya dan impor ke negara lain tanpa harus membayar tarif.

Meskipun memiliki status identitas yang berbeda baik ASEAN dan Tiongkok tetap melakukan kerja sama. Pada faktanya interdependensi ekonomi antara negara-negara di kawasan ASEAN dengan Tiongkok dapat mengurangi konflik antar negara. Interaksi ekonomi yang terjalin akan menjadikan negara semakin memahami negara lain sehingga dapat mengurangi ketidaksepahaman yang dapat berujung pada konflik. Dalam hal ini, melalui interdependensi ekonomi antara ASEAN kepada Tiongkok dapat

meredam sengketa Laut Cina Selatan. Interdependensi menawarkan dunia internasional yang kooperatif dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Meningkatnya interdependensi ekonomi ASEAN kepada Tiongkok akan lebih diperlukan dalam upaya peningkatan intra industri negara-negara tersebut. Terbentuknya mekanisme kerja sama, perjanjian, dan kesepakatan akan menciptakan integrasi yang konsisten dalam bidang ekonomi.

Pesatnya perkembangan globalisasi telah mendorong negara-negara untuk membentuk regionalisme salah satunya adalah ASEAN. Adanya regionalisme tersebut menjadikan negara harus melakukan interaksi dan kerja sama guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya. Paham regionalisme baru yang muncul pada awal tahun 1990-an tidak hanya berfokus pada kesamaan geografis dan wilayah melainkan struktur interaksi yang multipolar dan didominasi oleh bidang ekonomi dan budaya. Hal inilah yang mendorong Tiongkok untuk bergabung dalam perekonomian negara-negara berkembang di ASEAN.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa tulisan yang menjelaskan mengenai ketergantungan negara anggota ASEAN terhadap negara Tiongkok. Di antaranya adalah tulisan pertama mengenai ASEAN – China Free Trade Agreement yang fokus kepada peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam hubungan kerja sama yang berlangsung (Adam et al., 2017). Kedua, tulisan yang fokus kepada globalisasi yang menjadi penyebab terhadap ketimpangan enam negara-negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Kamboja (BEKTI, 2019). Ketiga yakni tulisan yang menjelaskan mengenai ketergantungan Laos terhadap Tiongkok yang berdampak terhadap kesenjangan yang terjadi di domestik Laos yang masih tinggi (Yoshida, 2022). Dari ketiga tulisan tersebut, hanya tulisan kedua yang menjelaskan mengenai dinamika hubungan Tiongkok terhadap ketimpangan negara-negara anggota ASEAN. Tulisan ini melanjutkan tulisan kedua tetapi berfokus kepada pengaruh globalisasi terhadap saling ketergantungan antara negara anggota ASEAN dengan negara Tiongkok.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana proses globalisasi menjadi penyebab dan berpengaruh terhadap interdependensi negara berkembang pada negara Tiongkok. Peneliti juga ingin mengkaji negara berkembang yang mana saja yang telah memiliki ketergantungan terhadap negara Tiongkok. Peneliti memilih negara di kawasan Asia Tenggara sebagai negara yang memiliki ketergantungan terhadap Tiongkok dikarenakan peneliti melihat banyak negara berkembang di Asia Tenggara yang melakukan kerja sama dengan Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari globalisasi dapat menyebabkan peningkatan interdependensi negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara terhadap negara Tiongkok.

Dalam tulisan ini, penulis berasumsi bahwa globalisasi telah membawa negara-negara untuk melakukan kerja sama internasional dan kerja sama internasional lebih mudah dilakukan dalam satu kawasan regional. Kerja sama regional dianggap akan membuka peluang bagi negara-negara yang berada dalam satu kawasan untuk membentuk liberalisasi perdagangan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Liberalisasi perdagangan yang dilakukan ASEAN dianggap belum cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga membutuhkan campur tangan negara besar lainnya seperti Tiongkok. Kerja sama ASEAN dan Tiongkok dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) telah memberikan banyak keuntungan, namun kerja sama ini juga membuat anggota ASEAN khususnya negara berkembang menjadi sangat

bergantung kepada Tiongkok. Ketergantungan atau interdependensi khususnya bidang ekonomi negara berkembang ASEAN terhadap Tiongkok cenderung menguntungkan Tiongkok. Hal ini dikarenakan besarnya power yang dimiliki Tiongkok dalam bidang perekonomian. Dominasi Tiongkok pada negara berkembang di ASEAN terlihat dari campur tangan Tiongkok dalam pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Sehingga, ketergantungan negara berkembang ASEAN terhadap Tiongkok akan menjadi ancaman dalam upaya ASEAN menjaga kestabilan dan kedaulatan negara-negara ASEAN.

Pada tulisan ini, penulis menggunakan konsep interdependensi guna menjawab pertanyaan penelitian. Konsep interdependensi diadopsi dari pandangan liberalis. Konsep ini merujuk pada adanya sikap saling ketergantungan di antara negara-negara yang terlibat dalam kerja sama. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, konsep interdependensi merupakan adanya interaksi timbal balik antara negara satu dan lainnya dalam hubungan internasional (Jackson, 1999). Konsep interdependensi juga dapat dikatakan sebagai sikap saling bergantung yang kemudian akan ditemukannya kekurangan dari negara-negara yang saling bekerja sama dengan membandingkan kualitas masyarakat (Ikbar, 2007). Sikap saling ketergantungan muncul dikarenakan suatu negara akan sulit untuk memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya tanpa ada kerja sama dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Konsep interdependensi muncul dengan anggapan bahwa tidak ada negara yang otonom, dimana seluruh negara ikut dalam menggerakkan ekonomi dunia. Dikatakan bahwa negara berkembang juga dapat bergerak menjadi negara maju walaupun dalam perkembangannya membutuhkan atau bergantung dengan negara lain. Interdependensi negara berkembang dikarenakan peningkatan perekonomian di negaranya masih rendah. Dalam konsep interdependensi, negara berkembang yang sangat bergantung kepada negara maju akan mendapatkan dampak peningkatan ekonomi ketika ekonomi negara maju meningkat. Namun, ketika perekonomian negara maju yang menjadi sandaran negara berkembang mengalami ketidakstabilan ekonomi, maka negara berkembang juga akan mendapatkan dampak seperti itu.

Konsep interdependensi biasanya dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki perekonomian kuat untuk melancarkan kepentingannya. Adanya interdependensi akan membuat negara lemah terus-menerus meminta bantuan dengan negara maju untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan begitu, negara maju akan memanfaatkan hal tersebut dengan meminjamkan utang luar negeri dengan jaminan-jaminan tertentu yang mungkin akan merugikan negara lemah tersebut. Dalam tulisan ini, peneliti melihat adanya interdependensi negara berkembang Asia Tenggara terhadap Tiongkok. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara maju yang memiliki perekonomian kuat.

Metodologi

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak dengan variabel lainnya (Mulyadi, 2011). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yang berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber bahan bacaan lainnya yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis bahan bacaan tersebut. Tentunya bahan bacaan harus relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memahami secara mendalam

terkait teori dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Fadli, 2021). Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Setidaknya terdapat tiga jenis tahapan dalam analisis data ini yaitu reduksi data dengan cara menyeleksi data dan memasukkan data yang diperlukan saja, display data dengan cara menyusun data-data yang telah didapat dari sumber bacaan yang disusun secara sistematis, dan conclusion dengan memvalidasi data yang telah disusun yang kemudian dijadikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Interdependensi Kamboja, Laos, dan Malaysia terhadap Tiongkok

Kamboja, Laos dan Malaysia merupakan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Ketiga negara ini tentunya masih membutuhkan kerja sama dengan negara lain dalam meningkatkan perekonomian. Menjalin kerja sama dengan negara maju nampaknya menjadi pilihan tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tiongkok sebagai negara maju memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang untuk menjalin hubungan kerja sama.

Hubungan kerja sama Kamboja dan Tiongkok telah dimulai sejak lama. Pada masa pemerintahan Pol Pot yang dimulai sejak tahun 1975, hubungan kerja sama Kamboja dengan dunia internasional terhenti. Hal ini dikarenakan Pol Pot menganut ideologi komunis sehingga ingin menciptakan negara mandiri dan tidak memerlukan bantuan negara lain. Namun, Kamboja tetap berhubungan dengan negara Tiongkok, Vietnam, dan Swedia yang didasarkan negara-negara tersebut memiliki ideologi yang sama dengan Kamboja yaitu ideologi komunis. Setelah terjadinya kekacauan politik, Tiongkok menjadi negara pertama yang menghormati adanya transisi pemerintahan di Kamboja. Tiongkok melakukan hal tersebut dikarenakan prinsip non-interference dan menghargai pemerintahan yang baru (jakartapost, 2018). Hubungan diplomatik Kamboja dengan Tiongkok juga erat pada masa pemerintahan Pol Pot yang disebabkan Pol Pot banyak mengadopsi ide-ide revolusi dari Tiongkok. Pada masa itu juga Tiongkok sangat mendukung pemerintahan Pol Pot dan memberikan dukungan berupa bantuan militer dan ekonomi ke Kamboja (Allen & Ngô, 1991).

Dalam perkembangannya, hubungan Kamboja dengan Tiongkok semakin meluas hingga berbagai bidang. Kamboja dan Tiongkok sama-sama melihat peluang hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya. Kamboja dan Tiongkok membentuk kerja sama di bidang pariwisata, keuangan, transportasi, pendidikan, konstruksi, dan layanan bisnis. Jalinan kerja sama Kamboja dan Tiongkok dapat dikatakan berhasil di berbagai bidang. Di bawah kerangka ACFTA, Kamboja dan Tiongkok membentuk kerja sama baru dalam restrukturisasi industri.

Interdependensi Kamboja terhadap Tiongkok dapat dilihat dari banyaknya hubungan kerja sama yang menghasilkan banyak keuntungan. Keuntungan bagi Kamboja, negara Tiongkok dari masa pemerintahan Pol Pot telah memberikan sejumlah bantuan baik dari segi ekonomi dan juga militer. Prak Sokhon yang merupakan wakil perdana menteri Kamboja menyebutkan bahwa Tiongkok masih memberikan bantuan hingga sekarang seperti bantuan dalam mendukung pembangunan ekonomi Kamboja dan bantuan dalam melawan Covid-19 (Maulana et al., 2019). Tiongkok juga membantu Kamboja dengan membuka kerja sama Silk Road E-Commerce atau jalur sutra e-commerce. Dimana kerja sama ini akan membantu para pengusaha kecil dan menengah

Kamboja dalam ekspor produk pertanian ke pasar Tiongkok sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kamboja. Kerja sama Silk Road E-Commerce merupakan salah satu bentuk promosi proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang merupakan rencana penanaman investasi miliaran dollar dari Tiongkok (Kalebos, 2020). Dalam program ini, baik Kamboja maupun Tiongkok sama-sama diuntungkan. Kamboja diberikan investasi sebesar USD 5,3 Miliar untuk proyek pelaksanaan BRI di Sihanoukville (Putri & Maarif, 2019). Kesepakatan proyek BRI telah mendatangkan peningkatan perdagangan yang signifikan antara Kamboja dan Tiongkok. Selain berdampak pada perdagangan, pelaksanaan BRI di kedua negara ini telah meningkatkan jumlah pengunjung yaitu sebanyak lebih dari 1 juta wisatawan yang masuk di Kamboja dan Tiongkok (Zakiyya & Purnama, 2022). Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak, pemerintah Kamboja dan pemerintah Tiongkok sama-sama menjadi saling ketergantungan. Kerja sama yang dilakukan tentunya telah meningkatkan perekonomian kedua negara. Terlebih lagi Kamboja sangat diuntungkan dengan berbagai bantuan yang didapat dari Tiongkok.

Negara berkembang Asia Tenggara lainnya yang juga interdependensi terhadap Tiongkok adalah Laos. Negara Laos merupakan negara yang tidak mempunyai daerah perairan seperti laut. Negara Laos memiliki julukan *landlocked country* yang berarti negara Laos merupakan negara berkembang dengan perekonomian sulit sehingga negara ini banyak bergantung dengan negara lain seperti bergantung kepada Tiongkok. Jalinan kerja sama antara Laos dan Tiongkok dilakukan sejak tahun 2000. Tiongkok telah melakukan investasi di berbagai bidang seperti pertambangan, pertanian, dan juga produk elektronik. Pada tahun 2002, Laos telah mengimpor banyak produk buatan Tiongkok yang diperkirakan mencapai 131 juta US Dollar. Laos banyak mengeksport hasil pertanian, pertambangan, emas, kayu dan produk kayu ke Tiongkok. Kemudian, Laos juga banyak mengimpor mesin, bahan bakar minyak, kendaraan, suku cadang, alat-alat produksi yang berasal dari Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Jepang (Putri & Maarif, 2019).

Interdependensi Laos terhadap Tiongkok dapat dilihat dari mudahnya mencari produk asal Tiongkok di Laos. Produk-produk Tiongkok yang masuk di Laos dikarenakan banyak warga Laos yang berminat pada produk Tiongkok. Kerja sama Laos dan Tiongkok juga membawa keuntungan bagi Laos. Laos dapat meminjam dana dari Tiongkok dalam membangun negaranya. Tercatat pendanaan terhadap pembangunan nasional di Laos dari Tiongkok sebesar 50-75 persen (Yoshida, 2022). Saat ini, Tiongkok telah menjadi investor utama dan terbesar bagi Laos sehingga dengan bekerja sama dengan Tiongkok diharapkan akan meningkatkan perekonomian Laos. Tiongkok berinvestasi kepada Laos pada pengembangan satelit komunikasi dan televisi (Kusuma & Bachtiar, 2020).

Tiongkok juga memberikan bantuan ke Laos dengan cara memperkenalkan teknologi dan produksi berkualitas tinggi. Laos dan Tiongkok bekerja sama dalam pembangunan kereta api cepat yang akan menghubungkan Laos dan wilayah selatan Tiongkok. Pada akhirnya, proyek kereta api cepat di Laos juga akan melewati beberapa negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kerja sama ini tentunya menguntungkan kedua negara dalam mempercepat distribusi barang ekspor impor. Selain itu, proyek ini akan membantu pemerintah Laos dalam mengurangi angka pengangguran, dimana banyak warga Laos yang bekerja dalam pembangunan proyek tersebut. Dengan demikian, interdependensi kedua negara akan sangat kuat yang dilihat dari Laos membutuhkan Tiongkok dalam membangun infrastruktur di negaranya dan Tiongkok

membutuhkan Laos untuk memperluas pasar dan mempermudah distribusi barang di berbagai negara melalui proyek kereta api cepat di Laos.

Selain negara Kamboja dan Laos, peningkatan interdependensi terhadap Tiongkok juga terjadi di Malaysia. Kerja sama Malaysia dan Tiongkok telah dimulai sejak lama. Kerja sama ini telah terjadi sejak pemerintahan Abdul Rahman. Pada tahun 1971, Tiongkok membeli karet alam Malaysia sebanyak 40.000 ton. Dari tahun ke tahun, perdagangan Malaysia dan Tiongkok terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Jalinan antara Malaysia dan Tiongkok terus berjalan hingga pada tahun 2009, Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Malaysia. Hal ini berarti perdagangan dengan Tiongkok telah memberikan keuntungan yang besar bagi kedua negara khususnya bagi Malaysia. Adapun yang banyak diekspor Malaysia ke Tiongkok adalah minyak kelapa sawit, produk besi baja, karet dan kertas. Tiongkok telah memberikan sejumlah investasi proyek infrastruktur di Malaysia melalui kesepakatan MOU Tiongkok dan Malaysia. Salah satu contoh investasi Tiongkok terlihat pada proyek kereta api dan pelabuhan maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Malaysia yaitu pelabuhan Klang ke pelabuhan Kuantan.

Selain itu, Tiongkok juga memberikan investasi ke Malaysia dalam pembangunan proyek kereta dengan dana sebesar 13 miliar (Mudji et al., 2022). Kerja sama Malaysia dan Tiongkok di bawah kerangka kerja ACFTA sudah meningkat. Pada tahun 2020, perdagangan Malaysia dengan Tiongkok mencapai RM 329,77 miliar (BEKTI, 2019). Dimana Malaysia mengimpor produk dari Tiongkok sebesar 41 miliar USD dan mengekspor ke Tiongkok hingga mendapatkan 40 miliar USD. Lalu pada tahun 2021, perdagangan yang dilakukan Malaysia dan Tiongkok meningkat sebesar 49,8 persen (Julina et al., n.d.).

Peningkatan perdagangan akan menumbuhkan perekonomian di kedua negara. Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Malaysia telah meningkatkan perekonomian Malaysia. Jika Malaysia tidak lagi bekerja sama dengan Tiongkok, maka Malaysia akan kehilangan sebagian pendapatan negaranya. Selama masa pandemi covid, Tiongkok juga senantiasa membantu Malaysia dengan memberikan sejumlah bantuan medis dalam memerangi wabah tersebut. Bantuan tersebut berupa 100.000 masker N95, 500.000 masker wajah, 100.008 PCR, 500.000 peralatan bedah, 50.000 APD, dan 200 unit ventilator (Aulia et al., 2019). Ketergantungan Malaysia terhadap Tiongkok dapat dilihat dari Malaysia membutuhkan Tiongkok sebagai pasar dalam mengekspor produknya dan membutuhkan Tiongkok dalam investasi dan pinjaman luar negeri.

Interdependensi Indonesia, Vietnam, dan Thailand terhadap Tiongkok

Dinamika hubungan multilateral negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan Tiongkok merupakan bentuk dari implementasi regionalisme baru. Adanya kepentingan ekonomi mendorong negara-negara tersebut untuk melakukan kerja sama antar pemerintah guna mencapai kepentingan nasionalnya. Kemajuan ekonomi Tiongkok menjadikannya sebagai negara yang berpotensi sebagai partner dalam pembangunan ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Tiongkok juga menunjukkan kapasitas negaranya dalam bidang ekonomi sebagai regional power di Asia sehingga mampu mengambil peran sebagai hegemon dunia menyaingi Amerika Serikat. Pada dasarnya sebagai hasil dari adanya proses interaksi antar negara atau antar aktor dalam hubungan internasional, negara-negara memiliki aktivitas yang mereka bangun untuk saling mempengaruhi dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing (Zakiyya & Purnama, 2022).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok pada dasarnya telah berjalan selama 72 tahun. Kemitraan ini menunjukkan kemajuan yang pesat di sektor ekonomi seperti adanya peningkatan kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif di tahun 2013. Sejak dilakukannya reformasi ekonomi Tiongkok menjadikannya memperoleh ‘posisi’ di dalam perekonomian dunia internasional. Lingkungan strategis Indonesia mulai dari tataran global dan regional Asia Timur, akan terus mengalami perubahan-perubahan penting yang akan menentukan relevansi, posisi, dan peran Internasional (Fuddin, 2016). Hal inilah yang kemudian menjadikan posisi Indonesia tidak terlepas dari implikasi strategis yang muncul karena adanya kompleksitas lingkungan di kawasan terutama terhadap perkembangan geopolitik Tiongkok yang semakin mendominasi di Asia Tenggara.

Perekonomian Tiongkok yang tangguh juga menjadikannya sebagai peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan ekonominya terutama pada bidang perdagangan dalam pemasaran komoditas dan energi yang sudah lama dijalankan. Puncak dari hubungan kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok adalah pada 25 April 2005 pada saat penandatanganan Strategic Partnership Declaration. Melalui deklarasi tersebut Indonesia bertujuan untuk mencapai kestabilan dan menaikkan level ekonomi Indonesia dalam dinamika persaingan dengan negara lainnya. Selain itu juga, deklarasi tersebut menjadikan Indonesia dan Tiongkok sebagai satu kekuatan di kawasan Asia sehingga mampu menandingi negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki tahap akhir dari deklarasi kemitraan periode pertama, mendorong kedua negara untuk melanjutkan kerja sama periode 2010-2015. Melalui konsep Plan of Action, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok. Hal ini dikarenakan Tiongkok memiliki arti penting dan signifikan bagi Indonesia dalam meraih kestabilan ekonomi.

Melalui pembentukan ACFTA juga mendorong keterlibatan Tiongkok pada perekonomian Indonesia. Melalui pengurangan hambatan perdagangan baik tarif dan non-tarif di kawasan Asia Tenggara semakin membuka akses investasi Tiongkok di Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam kerja sama ACFTA tentunya dapat menjadi ancaman dalam masuknya produk-produk Tiongkok dan penanaman modal asing. Meskipun ACFTA memberikan keuntungan bagi Indonesia, tidak dipungkiri bahwa Tiongkok memanfaatkan ACFTA sebagai instrumen guna mencapai hegemoni ekonominya di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tahun 2018 defisit perdagangan Indonesia-Tiongkok menyentuh angka 18.41 Miliar USD. Hal ini menunjukkan bahwa impor yang dilakukan Indonesia dari negara ACFTA lebih tinggi dari pada ekspor. Selain itu pula, Persentase total nilai impor Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan jumlah nilai impor Indonesia dari ASEAN dan Tiongkok mendominasi dengan jumlah persentase masing-masing sebesar 24% (Dewi et al., 2019). Kebijakan ACFTA juga dapat menyebabkan Indonesia mengalami kerugian karena adanya trade division.

Selain kerja sama dalam kerangka ACFTA, Indonesia dan Tiongkok juga bekerja sama dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI). Proyek BRI menjadi perwujudan dari visi Tiongkok yaitu “Chinese Dream”, agar Tiongkok dapat memimpin dunia (Kartika & Surwandono, 2023). Kerja sama ini pertama kali disepakati Indonesia pada tahun 2016. Dalam program ini, Tiongkok memberikan sejumlah investasi dan transfer pekerja ke Indonesia (Yudilla, 2019). Indonesia melihat peluang BRI akan membantu dalam pembangunan infrastruktur sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, adanya proyek BRI semakin meningkatkan interdependensi Indonesia

terhadap Tiongkok.

Negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yang mengalami ketergantungan dengan Tiongkok adalah Thailand dan Vietnam. Dalam hal ini dominasi Tiongkok dapat dilihat dari upaya Tiongkok membangun hegemoni atas Sungai Mekong. Sungai Mekong atau disebut juga Lancang Jiang merupakan sungai yang mengalir 6 negara yaitu Tiongkok, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand. Sebagai sungai terpanjang ke-12 di dunia, kehadiran Sungai Mekong memberikan kebermanfaatan bagi negara-negara yang dialirinya. Bagi Tiongkok, Mekong berpotensi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan bagi negara hilir Mekong menjadi sumber irigasi sawah, jalur transportasi, sumber perikanan, dan sumber kekayaan mineral lainnya. Dalam konteks ini, Tiongkok merupakan negara dominan yang memiliki keunggulan ekonomi sehingga tidak ada negara Mekong baik Thailand maupun Vietnam yang mampu menentang kebijakan Tiongkok dalam pemanfaatan Mekong.

Dominasi dan kontrol Tiongkok pada sungai Mekong yaitu berupa bantuan modal bagi negara yang tergabung dalam Lancang Mekong Cooperation LMC) yang merupakan gagasan Tiongkok sendiri. pembentukan LMC merupakan agenda Tiongkok untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara hilir, meningkatkan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mendukung pembangunan Komunitas ASEAN serta mempromosikan implementasi agenda PBB (Indrayani et al., 2021). Jika dianalisis pembentukan LMC ini sebagian besar hanya mengakomodasi kepentingan dari Tiongkok saja, karena aturan yang dirumuskan hanya dilakukan oleh Tiongkok sebagai inisiator. Secara tidak langsung maka Tiongkok telah menjadikan kedua negara tersebut menjadi ketergantungan dalam aspek keuangan dan bantuan teknologi sehingga membatasi Thailand dan Vietnam dalam upaya pengembangan ekonomi negaranya melalui pemanfaatan sungai Mekong (Anggraini, 2020).

Di sisi lain, kerja sama yang dilakukan oleh Vietnam dan Tiongkok telah memberikan peningkatan ekonomi bagi Vietnam. Melalui pembangunan proyek Belt and Road Initiatives (BRI) yang diusung oleh Tiongkok membantu Vietnam dalam pengoptimalan pengelolaan industri SDA negaranya. Vietnam menjadi salah satu contoh negara yang dapat memaksimalkan potensi dari globalisasi melalui transformasi kebijakan ekonominya. Terdapat beberapa faktor pendorong kerja sama Vietnam dan Tiongkok. Pertama, ditinjau dari faktor sejarah dimana Vietnam merupakan bagian dari rencana kekaisaran Tiongkok ketika melakukan ekspansi ke selatan. Kedua, geografis kedua negara berdekatan sehingga meningkatkan posisi strategis Vietnam. Ketiga, adanya kesamaan ideologi yang dianut yaitu sosialis (Ramadhan, 2018).

Melalui proyek BRI, perekonomian Vietnam akan semakin tereintegrasi dan didominasi oleh Tiongkok. Hal ini dikarenakan sebagai negara berkembang tentunya Vietnam memiliki kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dalam negerinya. Maka dari itu, peningkatan pemenuhan pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan pendanaan yang besar. Ekspansi Tiongkok terlihat melalui pembangunan BRI sebagai pihak yang mendanai kebutuhan pembangunan Vietnam. Sebagai bentuk komitmen Vietnam untuk terlibat dalam proyek BRI dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dalam rangka promosi kerangka kerja sama "Two Corridors, One Belt" dalam kerangka BRI pada tahun 2017 (Suharman dan & Pramono, 2021).

Faktor letak wilayah yang berdekatan menjadikan peluang Vietnam sebagai gerbang masuknya produk Tiongkok ke kawasan ASEAN. Selain itu, Foreign Direct Investment (FDI) yang dialirkan melalui BRI juga dapat membantu optimalisasi pembangunan infrastruktur negara tersebut. Sejauh ini terdapat 18 proyek BRI yang

sedang direncanakan yang tersebar di 7 wilayah Vietnam (Maharani & Rijal, 2022). Adapun wilayah tersebut adalah Lao Cai, Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh, Hai Phong, Binh Thuan, dan Hai Noi. Namun, ketergantungan ini juga akan menjadi ancaman bagi Vietnam mengingat Tiongkok sebagai negara dengan power ekonomi yang besar tidak dapat ditandingi negara berkembang seperti Vietnam. Hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap perangkat utang Tiongkok.

Selain Indonesia dan Vietnam, Thailand juga merupakan negara yang melakukan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Kerja sama tersebut dimulai sejak akhir 1970-an ketika Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia internasional. Thailand adalah negara pertama yang mengekspansi pasar Tiongkok. CP Group memulai investasi di Tiongkok di bawah Chia Tai Co., Ltd. di Shenzhen sebagai investor pertama asing pertama di Tiongkok dengan nomor registrasi “0001” (Alunaza & Sarifudin, 2017).

Pada dasarnya, ekspansi perdagangan Tiongkok dilakukan bertahap, dimulai dari pergerakan Tiongkok sebagai lima besar mitra dagang Thailand mulai tahun 2002. Hal ini tentunya berkaitan dengan kebangkitan Tiongkok sebagai pusat ekonomi regional. Setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 maka hubungan ekonomi Thailand dan Tiongkok mengalami perubahan. Pemerintah Tiongkok berhasil mengubah pandangan bahwa Tiongkok merupakan partner ekonomi yang dapat diandalkan. Pada tahun 2014, Thailand mengalami permasalahan ekonomi akibat kudeta. Namun, Thailand berhasil meningkatkan indikator ekonominya pada 2016. Adanya kunjungan dari perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang ke Thailand pada Desember 2014, dimanfaatkan oleh Thailand untuk mendeklarasikan bahwa permasalahan politik dalam negerinya bukanlah hambatan untuk perdagangan. Tiongkok mendukung Thailand dan menyetujui dua MoU mengenai proyek kereta api utama dan pembelian hasil pertanian. Hal inilah yang menjadikan Thailand mengklaim bahwa Tiongkok menyelamatkan ekonominya melalui investasi.

Saat ini sebagai negara berkembang Thailand mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi oleh Thailand adalah bagaimana merevitalisasi dan mengatasi middle-income trap. Oleh karena itu, melalui Master Plan ASEAN tentang konektivitas dan BRI diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama Thailand dan Tiongkok. Pada tahun 2021, Tiongkok merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Thailand (Anuson, 2015). Bagi Tiongkok sendiri, Thailand adalah mitra dagang terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara dan ketiga belas secara internasional (Kurniawan, 2018). Dalam hal ini Thailand dan Tiongkok menjadi partner strategis yang komprehensif terutama di bidang ekonomi.

Interdependensi Tiongkok terhadap Negara Berkembang di Kawasan Asia Tenggara

Pada dasarnya setiap negara membutuhkan negara lain dalam memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing. Begitu juga Tiongkok, walaupun negara maju tapi tetap masih membutuhkan negara lain seperti negara berkembang di Asia Tenggara dalam mencapai kepentingannya. Tiongkok memandang kawasan Asia Tenggara sebagai tempat strategis untuk memperkuat pengaruhnya dalam kancah internasional. Tiongkok banyak menginvestasikan dan meminjamkan utang luar negeri ke negara-negara Asia Tenggara agar Tiongkok bisa mewujudkan ambisinya sebagai negara pusat perekonomian yang baru. Penerapan proyek Belt and Road Initiative (BRI) merupakan bentuk usaha Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di berbagai negara. Tiongkok juga memiliki ketergantungan dengan negara-negara berkembang Asia Tenggara dalam mewujudkan keberhasilan proyek BRI (Albi et al., 2021).

Tabel 1. Daftar Negara Anggota BRI di Kawasan Asia Tenggara

Negara	Kategori Pendapatan Negara	Tahun Bergabung
Brunei Darussalam	Pendapatan Tinggi	2018
Kamboja	Pendapatan menengah ke bawah	2013
Timor Leste	Pendapatan menengah ke bawah	2017
Indonesia	Pendapatan menengah ke bawah	2015
Laos	Pendapatan menengah ke bawah	2018
Malaysia	Pendapatan menengah ke atas	2017
Myanmar	Pendapatan menengah ke bawah	2016
Filipina	Pendapatan menengah ke bawah	2017
Singapura	Pendapatan Tinggi	2018
Thailand	Pendapatan menengah ke atas	2014

Sumber: Council on Foreign Relations

Tabel di atas merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam proyek BRI Tiongkok. Melalui negara-negara tersebut, Tiongkok dapat memperluas pengaruhnya dan dominasi nya di wilayah Asia Tenggara. Adanya kerja sama BRI Tiongkok dengan negara Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos dan negara kawasan Asia Tenggara lainnya menjadi upaya Tiongkok dalam mewujudkan keberhasilan proyek BRI Tiongkok (Adam et al., 2017). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan dengan negara yang memiliki pendapatan menengah baik menengah ke bawah maupun ke atas yang biasa dikenal dengan negara berkembang. Negara berkembang cenderung memiliki sumber daya alam yang banyak sehingga Tiongkok dapat melakukan impor barang yang dibutuhkan negaranya dari negara berkembang. Selain itu, Tiongkok membutuhkan negara berkembang Asia Tenggara untuk memperlancar perdagangan dan arus barang secara global. Hal inilah menjadi penyebab interdependensi Tiongkok terhadap negara berkembang di kawasan Asia Tenggara (Alunaza, 2019).

Proyek BRI juga dapat dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur seperti adanya pembangunan-pembangunan kereta api cepat di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Proyek BRI banyak diterima oleh negara-negara berkembang Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Melalui proyek BRI, Tiongkok mengharapkan terjadi peningkatan dalam sektor perdagangan antara

Tiongkok dan negara berkembang kawasan Asia Tenggara sehingga pasokan dalam negara Tiongkok akan selalu tercukupi. Proyek BRI juga merupakan rencana Tiongkok untuk memperkuat pengaruh serta kedudukannya di kawasan Asia Tenggara (Habibi, 2011). Tiongkok mendapatkan keuntungan ekonomi yang melalui BRI, hal ini dapat mendorong negara tersebut menjadi the next superpower. Pengembangan proyek BRI itu meningkatkan pemasukan devisa bagi Tiongkok baik secara finansial maupun sumber daya material (Alunaza & Musfiroh, 2020).

Selain memanfaatkan proyek BRI untuk mencapai kepentingannya di Asia Tenggara, Tiongkok juga menggunakan strategi ekspansi ekonominya melalui ACFTA. Kerja sama ACFTA yang merupakan kesepakatan Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN mampu menjadi pasar terbesar setelah Uni Eropa dan NAFTA. Perkembangan ekonomi Tiongkok yang diikuti dengan jumlah penduduk yang besar mendorong Tiongkok untuk menggerakkan berbagai industri dalam negerinya. Dalam hal ini Tiongkok sangat bergantung pada negara berkembang sebagai pemasok sumber bahan baku dan sebagai pasar bagi produk industrinya yang memiliki keunggulan komparatif. Comparative advantage yang dimiliki Tiongkok dapat memberikan surplus ekonomi secara maksimal melalui ekspor produk industrinya ke negara di kawasan Asia Tenggara. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, ketergantungan Tiongkok pada negara berkembang di kawasan Asia Tenggara memfokuskan pada sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Melalui kerangka kerja sama ACFTA juga memungkinkan Tiongkok untuk mengakses pasar ASEAN. Pemberlakuan ACFTA dinilai telah meningkatkan investasi negara-negara ASEAN di Tiongkok sebanyak 6,3 miliar USD.

Bagi Tiongkok, Asia Tenggara menjadi penting karena merupakan kawasan yang strategis. Aktivitas perdagangan di Asia Tenggara meliputi perdagangan dengan volume yang relatif tinggi dari negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Australia, termasuk impor minyak dan transit Sea Lanes of Communications (SLOCs). Jalur yang dikenal dengan Sea Lanes of Communications (SLOCs) tersebut berperan penting dalam proses perdagangan dunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi beberapa negara baik di kawasan maupun negara di luar kawasan Asia Pasifik (Armawi & Wijatmoko, 2022). Perairan Asia Tenggara juga merupakan akses bagi kapal-kapal dagang dan tanker. Sebanyak 90% pasokan minyak Tiongkok melalui perairan Asia Tenggara. Sehingga Tiongkok bergantung pada perairan kawasan Asia Tenggara (Wildani et al., 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa negara berkembang di Asia Tenggara bergantung dalam banyak hal kepada negara Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat dari kepentingan enam negara yang menjalin kerja sama dengan Tiongkok atas alasan pembangunan sektor ekonomi dan stabilitas domestik negara. Di samping ketergantungan negara berkembang tersebut, Tiongkok juga melakukan hal yang sama, dimana Tiongkok begitu memerlukan negara-negara di Asia Tenggara sebagai perluasan pencapaian kepentingan nasional dan Chinese Dream dalam konstelasi politik global Tiongkok di mata dunia internasional. Tulisan ini menunjukkan bahwa tidak hanya negara berkembang di Asia Tenggara saja yang bergantung kepada Tiongkok, tetapi negara besar seperti Tiongkok pun memerlukan negara Asia Tenggara sebagai mitra strategis dalam dinamika perpolitikan dunia. Ketergantungan baik Asia Tenggara atau pun Tiongkok tidak dapat terlepas dari perkembangan situasi dunia dan globalisasi yang semakin berkembang begitu pesat.

Peningkatan interdependensi pada konteks negara-negara berkembang di kawasan

Asia Tenggara terhadap Tiongkok dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok mampu memberikan sejumlah investasi, utang luar negeri, dan bantuan kepada Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand sehingga dengan bantuan-bantuan ini membuat negara berkembang Asia Tenggara menjadi ketergantungan dengan Tiongkok. Kepentingan negara-negara berkembang tersebut dalam membutuhkan bantuan dana Tiongkok adalah untuk membangun berbagai infrastruktur di negaranya. Ketergantungan negara berkembang Asia Tenggara terhadap Tiongkok disebabkan negara-negara tersebut belum memiliki perekonomian yang cukup kuat. Kepentingan Tiongkok dalam memberikan berbagai investasi dan pinjaman luar negeri adalah untuk menguatkan pengaruhnya dan memperluas pasar ekspor Tiongkok terkhususnya dalam pembahasan ini pengaruh Tiongkok terhadap negara berkembang Asia Tenggara. Dalam pembahasan di atas terlihat ketergantungan negara berkembang Asia Tenggara lebih besar terhadap Tiongkok daripada ketergantungan Tiongkok terhadap negara berkembang Asia Tenggara. Terlebih lagi, Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi negara-negara ASEAN sehingga kerja sama dengan Tiongkok menjadi sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan perekonomian negara.

Dalam tulisan ini, penulis hanya membahas bagaimana enam negara yakni Laos, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand memiliki ketergantungan kepada Tiongkok. Ada beberapa negara yang belum dapat diulas oleh penulis dalam penelitian ini. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan bahwa keenam negara berkembang di Asia Tenggara seperti yang sudah penulis sampaikan di atas memiliki ketergantungan kepada negara Tiongkok. Akan ada hasil penelitian yang berbeda, jika melihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Sebagai rekomendasi untuk penulisan lanjutan, dapat dijelaskan lebih jauh dan spesifik bagaimana Filipina, Myanmar, Singapura, dan Brunei Darussalam juga memiliki ketergantungan kepada negara Tiongkok.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Adam, L., Siwage, D., & Negara, D. (2017). Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 1–24. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/633>
- Albi, S., Oktyari Retnaningsih, U., & Eka Nizmi, Y. (2021). Strategi Asean Menghadapi Persaingan Kekuatan Amerika Serikat Dan China Di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal Publicuho*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16116>
- Allen, D., & Ngô, V. L. (1991). Coming to terms : Indochina, the United States, and the war. 350.
- Alunaza, H. (2019). Indonesia di Tengah Rivalitas China, Jepang, dan India: Tinjauan Buku. *Indonesian Perspective*, 4(2), 191–196. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26702>
- Alunaza, H., & Musfiroh, M. (2020). Strategi Engagement China terhadap New Zealand dan Australia Melalui Kerja Sama Bantuan Trilateral di Asia Pasifik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 195–209. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.3421.195-209>

- Alunaza, H., & Sarifudin, M. (2017). Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7>
- Anggraini, G. (2020). Strategi Global Jalur Sutra Tiongkok Abad Ke-21: Tiongkok Dan Arsitektur Keamanan Asia Pada Periode Pemerintahan Xi Jinping.
- Anuson, C. (2015). Rise of China: A perceptual challenge for Thailand. *Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(2), 13–18.
- Armawi, A., & Wijatmoko, E. (2022). Asia Pasifik Memanas, Ancamankah bagi ASEAN dan Indonesia? *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 365–389. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V7N1.17>
- Aulia, R. U., Harianto, H., & Novianti, T. (2019). Analisis Posisi Pasar Indonesia Pada Pasar Refined Palm Oil (Rpo) Di Negara Importir. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 27(1), 1–12. <https://doi.org/10.22302/IOPRI.JUR.JPKS.V27I1.56>
- BEKTI, P. S. (2019). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di ASEAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6044>
- CNBCIndonesia. Mahathir Jadi PM Malaysia, Investasi China Bisa Terpukul. (n.d.). Retrieved June 12, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180511161441-4-14581/mahathir-jadi-pm-malaysia-investasi-china-bisa-terpukul>
- Dewi, S. khamila, Sahara, & Mulatsih, S. (2019). Dampak ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Trade Creation Dan Trade Diversion Indonesia Di Kawasan ACFTA+3. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 8(1), 84–100. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.84-100>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075>
- Fascacellya E. Kalebos, M. M. T. E. T. (2020). Kerjasama Indonesia-China (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30460>
- Fuddin, A. H. (2016). Pengaruh Perkembangan Geopolitik dan Geostrategi Tiongkok. *Jurnal Lemhannas RI*, 4(1), 5–12. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/136>
- Gunawan, Sarah. (2022). China dan Kamboja Buka Jalur Sutra Khusus e-Commerce. (n.d.). Retrieved June 12, 2023, from <https://dunia.rmol.id/read/2022/06/26/538221/china-dan-kamboja-buka-jalur-sutra-khusus-e-commerce>.
- Habibi, M. (2011). Memahami ACFTA dari Perspektif “Masyarakat Jaringan.” *Jurnal Kajian Wilayah*, 2(1), 99–149.
- Indrayani, I., Zulkarnain, Z., & Erawati, D. (2021). Hegemoni Tiongkok Atas Sungai Mekong dan Pengaruhnya Terhadap Negara di Bagian Hilir: Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1), 89–108. <https://doi.org/10.47313/JIB.V42I1.1167>
- Julina, M. (n.d.). (asean -china free trade area): Menguntungkan atau Merugikan Indonesia, ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme. *Jurnal Alternatif Vol 2* (1, 2-18.

- Kartika, I. T., & Surwandono, S. (2023). Analisis Wacana Kritis Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Pidato Xi Jinping. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 476–500. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V7N2.5>
- Kurniawan, Y. (2018). One Belt One Road (Obor): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/JP.V7I2.1135>
- Kusuma, S. C. W., & Bachtiar, J. W. (2020). Lao People's Democratic Republic's Dependency on China's Infrastructure Assistance. *WILAYAH: The International Journal of East Asian Studies*, 9(1), 19–31. <https://doi.org/10.22452/IJEAS.VOL9NO1.2>
- Maharani, N. R., & Rijal, N. K. (2022). Globalisasi Ekonomi Vietnam dalam Kerangka Pembangunan Belt and Road Initiative. *REFORMASI*, 12(1), 28–43. <https://doi.org/10.33366/RFR.V12I1.3328>
- Maulana, M. I., Sutrasna, Y., Halkis, M., Studi, P., Pertahanan, E., & Pertahanan, F. M. (2019). Potensi pembangunan kawasan perbatasan kabupaten sambas provinsi kalimantan barat dalam perspektif ekonomi pertahanan (. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol 5 (1), 165–192.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128–137. <https://doi.org/10.31445/JSKM.2011.150106>
- Putri, S. Y., & Maarif, D. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, September 2019, 53–66.
- Ramadhan, I. (2018). China's Belt Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.3>
- Reuters.com. 2018. China says foreigners should not interfere in Cambodia after election | Reuters. (n.d.). Retrieved June 12, 2023, from <https://www.reuters.com/article/us-asean-singapore-china-cambodia-idUSKBN1KN034>
- Suharman dan, Y., & Pramono, S. (2021). Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia. *SPEKTRUM*, 18(1). <https://doi.org/10.31942/SPEKTRUM.V18I1.4098>
- Wattimena, R. A. A. (Alexander A. 1983-, author. (2018). What are the fundamnetal pillars of contemporary globalization. <https://lib.ui.ac.id>
- Wildani, F., Yulianti, L., Luthfi, A., Kunci, K., Domistik, P., Perdagangan, B. :, & Impor, E. (2017). Analisis Integrasi Ekonomi Indonesia-China Terhadap Perekonomian Indonesia (Sebelum dan Sesudah ACFTA)). *JOURNAL of RESEARCH in ECONOMICS and MANAGEMENT*, 17(1). <https://doi.org/10.17970/jrem.17.1701012.ID>
- Yanuar Ikbar, author. (2007). Ekonomi politik internasional 2 : Implementasi konsep dan teori. <https://lib.ui.ac.id>
- Yoshida, Y. H. (2022). Ketergantungan Laos Pada Tiongkok Dalam Ekonomi Dan Pembangunan Sebagai Penghambat Terlaksananya Program Reduce Inequality. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 67–86. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.298>

- Yudilla, A. (2019). Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang dan Ancaman Untuk Indonesia. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 52–65. [https://doi.org/10.25299/JDIS.2019.VOL2\(01\).4427](https://doi.org/10.25299/JDIS.2019.VOL2(01).4427)
- Yuniarto, P. R. (2015). Masalah Globalisasi di Indonesia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67–95.
- Zakiyya, A., & Purnama, C. (2022). Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok tahun 2010-2018. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 92. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364>

Tentang Penulis

Hardi Alunaza Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Memiliki peminatan riset yang berhubungan dengan Kawasan Asia Pasifik, Diplomasi Publik, dan Kajian Politik Global. Pernah menerima beasiswa dari Ministry of External Affairs India dalam Program *Science Diplomacy* yang dilaksanakan di New Delhi India pada Januari 2020. Tercatat sebagai alumni Pengajar Muda untuk Kebijakan Luar Negeri Indonesia CSIS Indonesia.

Susi Cantika Asisten Peneliti dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan peminatan perdagangan internasional, kajian Asia Tenggara, dan kajian perbatasan Indonesia – Malaysia. Publikasi terbaru mengenai diplomasi Indonesia dalam penanganan pekerja migran di perbatasan Aruk Kabupaten Sambas.

Annisa Umniyah Asisten Peneliti dalam Asisten Peneliti dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan peminatan organisasi internasional, kajian Asia Tenggara, dan kajian perbatasan Indonesia – Malaysia. Publikasi terbaru mengenai peran United Nations dalam menangani isu kekerasan perempuan di Indonesia.